



## Program Seribu Jalan Mulus Kota Bengkulu: Analisis Strategi Infrastruktur Untuk Pembangunan Wilayah

Yanuar Rikardo<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Administasi Public Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [yanuarrikardo2@gmail.com](mailto:yanuarrikardo2@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [25 April 2025]

Revised [28 Mei 2025]

Accepted [04 Juni 2025]

### KEYWORDS

Infrastructure Development, Public Policy, Implementation Strategy, Good Governance, Bengkulu City

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Program Seribu Jalan Mulus merupakan kebijakan prioritas Pemerintah Kota Bengkulu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan lingkungan guna meningkatkan konektivitas wilayah dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi program tersebut, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menilai efektivitasnya dalam mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program oleh Dinas PUPR Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di kawasan padat penduduk serta wilayah pinggiran. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, hambatan geografis, mutu konstruksi yang bervariasi, dan lemahnya koordinasi antarinstitusi. Analisis juga menunjukkan bahwa prinsip good governance telah mulai diterapkan, namun aspek evaluasi berbasis dampak masih belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas teknis pelaksana, serta pelibatan lebih luas dari masyarakat dan sektor nonpemerintah dalam pengawasan pembangunan infrastruktur daerah.

### ABSTRACT

The Seribu Jalan Mulus (A Thousand Smooth Roads) Program is a flagship policy of the Bengkulu City Government aimed at accelerating the development of neighborhood road infrastructure to enhance regional connectivity and improve residents' quality of life. This study analyzes the implementation strategy of the program, identifies the challenges encountered, and evaluates its effectiveness in promoting sustainable regional development. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis focused on the implementation by the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) of Bengkulu City. The findings indicate that the program has significantly improved accessibility and mobility, especially in densely populated and peripheral areas. However, the implementation faces several obstacles, including budget constraints, geographic difficulties, inconsistent construction quality, and weak interagency coordination. The analysis also shows early signs of good governance principles being applied, although impact-based evaluation remains underdeveloped. The study recommends strengthening performance-based monitoring and evaluation systems, enhancing technical capacities of field implementers, and encouraging broader involvement from communities and non-government sectors in infrastructure oversight.

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendukung kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, infrastruktur jalan memegang peran krusial sebagai penghubung antarwilayah yang memungkinkan mobilitas manusia, barang, dan jasa secara efisien. Pembangunan jalan yang merata dan berkelanjutan tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi regional. Namun, berbagai wilayah di kota ini masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar, khususnya pada kondisi jalan lingkungan yang belum memadai. Akses jalan yang rusak, sempit, atau bahkan tidak layak seringkali menjadi penghambat aktivitas ekonomi masyarakat serta mengurangi kualitas layanan publik yang dapat diakses warga secara merata.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meluncurkan Program Seribu Jalan Mulus sebagai program prioritas daerah. Program ini bertujuan untuk memperbaiki dan membangun jalan lingkungan secara masif di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bengkulu. Tujuan strategis dari program ini mencakup peningkatan konektivitas antarwilayah, percepatan mobilitas warga, serta upaya pemerataan pembangunan agar tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan inti.

Program ini menarik untuk dikaji karena mencerminkan pergeseran pendekatan pembangunan infrastruktur yang tidak lagi bersifat top-down semata, tetapi mulai mengakomodasi pendekatan berbasis

kebutuhan lokal dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan program ini tentu tidak lepas dari tantangan teknis, administratif, maupun sosial, seperti keterbatasan anggaran, pengawasan yang belum optimal, serta koordinasi antarinstansi yang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana strategi yang diterapkan oleh Dinas PUPR Kota Bengkulu dalam pelaksanaan Program Seribu Jalan Mulus, mengidentifikasi berbagai tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, dan menilai sejauh mana efektivitas program ini dalam mendukung pembangunan wilayah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Strategi Pembangunan Daerah**

Pembangunan wilayah merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah, melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Menurut Friedmann (1987), strategi pembangunan daerah yang efektif harus mampu mengintegrasikan potensi lokal dengan sistem nasional, memperhatikan aspek spasial, sosial, dan ekonomi. Sementara Stohr dan Taylor (1981) menekankan pentingnya pembangunan dari bawah (*bottom-up development*) yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks infrastruktur, pembangunan jalan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal merupakan indikator keberhasilan strategi pembangunan wilayah. Jalan tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai instrumen pembuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, strategi pembangunan jalan harus mempertimbangkan keadilan spasial, efisiensi sumber daya, dan kesinambungan manfaatnya bagi masyarakat.

### **Teori Kebijakan Publik**

Menurut Thomas R. Dye (2013), kebijakan publik adalah "apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Teori kebijakan publik melihat proses pembuatan keputusan pemerintah sebagai hasil interaksi antara aktor, kepentingan, dan institusi. William Dunn (2018) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik melibatkan lima tahap: identifikasi masalah, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, dan evaluasi.

Dalam konteks penelitian ini, Program Seribu Jalan Mulus dapat dipandang sebagai implementasi kebijakan publik di bidang infrastruktur. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, dijalankan oleh Dinas PUPR, serta bagaimana dampaknya dievaluasi berdasarkan capaian fisik dan sosial di lapangan.

### **Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Infrastruktur**

Good governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. UNDP (1997) menyatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila pemerintahan mengadopsi prinsip-prinsip good governance dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program publik.

Dalam pelaksanaan Program Seribu Jalan Mulus, prinsip good governance menjadi penting untuk menilai sejauh mana proses pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara partisipatif, berorientasi hasil, serta mampu mempertanggungjawabkan alokasi anggaran dan pelaksanaan teknis kepada publik.

### **Pendekatan SWOT dalam Analisis Strategi**

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan alat strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu program. Menurut David (2011), analisis SWOT membantu organisasi memahami posisi strategisnya dan menyusun rencana yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Dalam konteks penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi implementasi Program Seribu Jalan Mulus, dengan memetakan kekuatan (misalnya cakupan wilayah), kelemahan (terbatasnya anggaran), peluang (dukungan masyarakat dan potensi pertumbuhan wilayah), serta ancaman (cuaca ekstrem atau resistensi politik).



## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi implementasi Program Seribu Jalan Mulus di Kota Bengkulu. Pendekatan ini dianggap paling relevan dalam menjelaskan fenomena kebijakan infrastruktur di tingkat lokal secara komprehensif, terutama dalam menggali proses, aktor, serta konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Studi kasus dipilih sebagai desain penelitian, karena memberikan kerangka analisis yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap satu unit kebijakan dalam konteks empiris yang nyata, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu sebagai pelaksana program.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara purposif terhadap informan yang memiliki relevansi langsung dengan program, antara lain pejabat struktural dan fungsional di Dinas PUPR, perangkat kelurahan, serta masyarakat penerima manfaat dari pembangunan jalan. Teknik observasi diterapkan untuk mengamati kondisi fisik jalan, aktivitas masyarakat di lokasi pembangunan, serta dinamika sosial yang muncul sebagai dampak dari program tersebut. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, berupa dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan, serta data teknis pendukung lainnya yang bersumber dari instansi pemerintah terkait.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan, yang kemudian disusun secara tematik untuk mendukung narasi analisis. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, sementara penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sepanjang proses penelitian. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta melakukan validasi temuan melalui konfirmasi kepada informan (member checking). Dengan strategi analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris terhadap kajian kebijakan pembangunan infrastruktur daerah yang berbasis pada konteks lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Program Seribu Jalan Mulus yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan program unggulan dalam bidang pembangunan infrastruktur jalan lingkungan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan kunci dari Dinas PUPR serta perangkat kelurahan dan warga terdampak, ditemukan bahwa program ini telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas wilayah dan mobilitas masyarakat. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan konektivitas yang merata antarwilayah, terutama di kelurahan-kelurahan yang selama ini terpinggirkan dari pembangunan infrastruktur dasar. Sebelum program ini berjalan, sebagian besar jalan lingkungan di kota ini, khususnya di wilayah padat penduduk dan pinggiran kota, masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui kendaraan, terutama saat musim hujan. Kondisi tersebut menimbulkan keluhan masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi serta sosial di tingkat lokal.

Berdasarkan data dari Dinas PUPR, hingga pertengahan tahun anggaran terakhir, program ini telah berhasil merealisasikan pembangunan dan perbaikan ratusan titik jalan lingkungan di berbagai kelurahan. Pekerjaan yang dilakukan meliputi peningkatan badan jalan dengan sistem pengaspalan hotmix, pembangunan rabat beton, serta pengerasan jalan dengan batu kerikil tergantung pada kondisi dan karakteristik lokasi. Selain itu, dalam beberapa lokasi, pembangunan jalan turut disertai dengan perbaikan drainase sebagai bagian dari sistem infrastruktur pendukung. Strategi implementasi program disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas yang ditentukan berdasarkan usulan masyarakat melalui forum Musrenbang serta hasil survei teknis dari tim Dinas PUPR. Penetapan zona pembangunan didasarkan pada urgensi akses, intensitas pemanfaatan jalan, serta potensi dampak sosial dan ekonomi bagi warga setempat.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program ini cukup tinggi. Di sejumlah lokasi, masyarakat ikut serta dalam proses identifikasi jalan prioritas, pemantauan pelaksanaan

kegiatan, hingga dalam bentuk swadaya untuk mendukung kelancaran proyek. Pelibatan ini memperkuat legitimasi sosial program dan meminimalisir resistensi di lapangan. Di sisi internal, Dinas PUPR juga melakukan penguatan kelembagaan melalui penyusunan rencana strategis kerja, pemetaan kebutuhan teknis, serta alokasi anggaran tahunan yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Dukungan kebijakan dari kepala daerah dan DPRD setempat turut mempercepat realisasi anggaran serta mempermudah proses lelang pekerjaan konstruksi.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi program. Pertama, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua wilayah yang telah diusulkan masyarakat dapat segera terealisasi dalam satu tahun anggaran. Hal ini menimbulkan persepsi ketimpangan dalam distribusi proyek antarwilayah. Kedua, dalam pelaksanaan fisik di lapangan, terdapat beberapa hambatan teknis seperti kondisi geografis yang sulit (berbukit, rawa, atau daerah tergenang), serta keterlambatan suplai material konstruksi. Ketiga, mutu hasil pekerjaan di beberapa titik belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, khususnya dalam hal daya tahan jalan terhadap beban lalu lintas atau curah hujan tinggi. Beberapa warga yang diwawancarai mengeluhkan bahwa jalan yang dibangun kembali mengalami kerusakan dalam waktu kurang dari satu tahun karena material yang digunakan dianggap kurang berkualitas.

Selain itu, ditemukan pula bahwa koordinasi antara Dinas PUPR dengan OPD lain, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan bagian pengadaan barang dan jasa, masih perlu ditingkatkan. Beberapa keterlambatan realisasi pekerjaan disebabkan oleh lambatnya proses administrasi di luar kewenangan teknis pelaksana. Dalam konteks pengawasan, masih terdapat ruang perbaikan dalam sistem monitoring dan evaluasi program. Walaupun terdapat pelaporan berkala, namun sistem evaluasi berbasis dampak (*impact evaluation*) masih belum dilaksanakan secara sistematis.

Meski menghadapi berbagai hambatan tersebut, secara umum Program Seribu Jalan Mulus dinilai berhasil memenuhi tujuan awalnya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan lingkungan di Kota Bengkulu. Dampak program terlihat pada meningkatnya aktivitas ekonomi warga, kemudahan akses transportasi, serta peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah kota. Warga yang sebelumnya kesulitan menjangkau sekolah, pasar, atau layanan kesehatan kini merasakan manfaat langsung dari jalan yang telah diperbaiki. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan lokal dan pendekatan partisipatif masyarakat memiliki efektivitas tinggi dalam konteks pembangunan wilayah kota menengah seperti Bengkulu.

## Pembahasan

Analisis SWOT terhadap Program Seribu Jalan Mulus Kota Bengkulu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Dari sisi kekuatan (*strengths*), program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah sebagai program unggulan, sehingga memperoleh alokasi anggaran yang relatif memadai. Fokus utama pada pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan lingkungan juga menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan langsung masyarakat. Dalam praktiknya, program ini telah mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, khususnya di kawasan padat penduduk dan wilayah pinggiran kota yang sebelumnya terisolasi.

Namun, terdapat sejumlah kelemahan (*weaknesses*) yang signifikan. Salah satunya adalah mutu pekerjaan jalan yang bervariasi dan belum sepenuhnya memenuhi standar konstruksi yang berkelanjutan. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas teknis di lapangan serta minimnya sistem evaluasi berbasis dampak. Evaluasi yang dilakukan sejauh ini cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh dimensi keberlanjutan atau kontribusi ekonomi secara kuantitatif. Berikut tabel analisis swot Program Seribu Jalan Mulus Kota Bengkulu.

**Tabel 1 Analisis SWOT**

Strengths (Kekuatan)	Strengths (Kekuatan)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan program prioritas pemerintah daerah, sehingga mendapat dukungan politik dan anggaran yang cukup</li> <li>• Fokus pada infrastruktur dasar (jalan), yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat</li> <li>• Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, terutama di daerah padat penduduk dan pinggiran kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan masih menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya teknis</li> <li>• Mutu pembangunan jalan tidak seragam dan berpotensi cepat rusak</li> <li>• Kurangnya sistem evaluasi dan pengawasan berbasis kinerja (<i>impact-based evaluation</i>)</li> </ul>



Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjadi model program infrastruktur partisipatif berbasis kebutuhan masyarakat</li> <li>• Potensi peningkatan ekonomi lokal melalui konektivitas wilayah</li> <li>• Bisa menarik dukungan dana dari pusat atau mitra pembangunan jika dikelola dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko tumpang tindih atau konflik antar instansi dalam implementasi teknis</li> <li>• Ketergantungan terhadap perubahan kebijakan pemerintah daerah berikutnya</li> <li>• Ketergantungan terhadap perubahan kebijakan pemerintah daerah berikutnya</li> </ul>

Dari aspek peluang (opportunities), program ini memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat. Jika dikelola secara partisipatif dan transparan, program ini dapat menarik dukungan dari pemerintah pusat, lembaga donor, atau mitra pembangunan lain yang memiliki komitmen pada pengembangan wilayah. Peningkatan konektivitas yang dihasilkan juga berpeluang mendorong aktivitas ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor informal. Sementara itu, ancaman (threats) utama terletak pada lemahnya koordinasi lintas instansi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi. Selain itu, keberlangsungan program sangat bergantung pada komitmen politik dari pemerintah daerah yang berkuasa. Jika tidak diiringi dengan sistem kelembagaan dan regulasi yang kuat, maka terdapat risiko program akan terhenti atau mengalami penurunan kualitas pada periode berikutnya. Lemahnya pengawasan publik juga membuka celah terhadap potensi penyimpangan anggaran.

Secara keseluruhan, hasil analisis SWOT ini menunjukkan bahwa Program Seribu Jalan Mulus memiliki nilai strategis yang tinggi dalam pembangunan wilayah perkotaan. Namun untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh pada aspek tata kelola, partisipasi masyarakat, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis dampak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Program Seribu Jalan Mulus yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bengkulu merupakan langkah strategis dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat, terutama di wilayah padat penduduk dan daerah pinggiran. Secara umum, program ini telah memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas serta kualitas hidup masyarakat setempat. Namun, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sejumlah kelemahan dalam aspek teknis dan kelembagaan.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, kekuatan program ini terletak pada dukungan politik dan anggaran, serta fokus pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi meliputi kualitas konstruksi yang belum merata, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis dampak, serta koordinasi lintas instansi yang belum terintegrasi secara maksimal. Selain itu, keberlanjutan program juga berpotensi terancam oleh pergantian kebijakan serta minimnya pengawasan publik.

### Saran

Pertama, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, tidak hanya pada aspek output fisik tetapi juga outcome sosial dan ekonomi. Kedua, Dinas PUPR disarankan untuk membangun mekanisme kolaboratif lintas sektor, termasuk pelibatan pihak swasta atau komunitas lokal dalam pembiayaan dan pengawasan proyek infrastruktur. Ketiga, peningkatan kapasitas teknis pelaksana di lapangan perlu menjadi prioritas, guna memastikan kualitas pekerjaan jalan yang tahan lama dan sesuai standar teknis. Terakhir, pengembangan sistem pelaporan publik yang transparan dan mudah diakses dapat memperkuat partisipasi masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- David, F. R. (2011). *Strategic management: Concepts and cases* (13th ed.). Pearson Education.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Friedmann, J. (1987). *Planning in the public domain: From knowledge to action*. Princeton University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Stohr, W. B., & Taylor, D. R. F. (1981). *Development from below: The bottom-up and periphery-inward development paradigm*. Routledge.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RND*. Alfabeta. Bandung.
- Suwantoro, G. 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme.  
<https://www.undp.org/publications/governance-sustainable-human-development>